

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdurrahma. 1980. *Beberapa Aspek Tentang Hukum Agraria*. Alumni. Bandung.
- Andrian Sutedi. 2017. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftaran*. Sinar Grafika. Jakarta.
- A.P.Parlindungan. 1990. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.
- Arba Muhammad. 2008. *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Asyhadie Zaeni dan Arief Rachman. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Aslan Noor. 2006. *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indosia Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju. Bandung.
- Bachtiar Effendie. 1982. *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*. Alumni. Bandung.
- Boedi Harsono. 1962. *Undang-Undang Pokok Agraria Bagian Pertama Jilid Pertama*. Djambatan. Jakarta.
- Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya*. Djambatan. Jakarta.
- Chomzah Ali Achmad. 2002. *Hukum Pertanahan*. Prestasi Pustaka. Jakarta.
- Kansil. 1994. *Pengantaran Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- R. Subekti. 2014. *Aneka Perjanjian*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali. Jakarta.
- Urip Santoso. 2010. *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Kencana. Jakarta.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998. Tentang Jabatan Pejabat Pembuatan Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963. Tentang Pertunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 38. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 2006.

C. JURNAL

Sigit Sapto Nugroho. *Hibah Tanah Dalam Perfektif Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Madiun. Sosial Volume 13 Nomor 1 Maret 2012.

Dena Murdiawati. *Kekuatan Hukum Penghibahan Tanah Dan Bangunan Secara Dibawah Tangan Di Kabupaten Lombok Barat*. Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2008.

D. INTERNET

<http://www.gresnews.com/berita/tips/2163012-tips-kekuatan-status-hukum-tanah-hibah/0/>. Diakses pada tanggal 10 November 2020, pukul 20:30.

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>. Diakses pada tanggal 10 November 2020, pukul 21:00.

<https://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/asas-dan-tujuan-pendaftaran-tanah>.Diakses pada tanggal 15 November 2020, pukul 20.00.

<http://makalahlengkap.blogspot.co.id/2014/12/makalah-perjanjian-hibah.html>
Diakses pada tanggal 16 November 2020.

<http://www.pengertianpakar.com/2014/11/pengertian-hibah-menurut-hukum-islam.html>. Diakses pada tanggal 16 November 2020.

<https://www.hukumproperti.com/pertanahan/hapusnya-hak-atas-tanah/>.Diakses pada tanggal 17 November 2020.

